



PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Jalan Hanoman No.18
Telp (024) 7600803 Fax (024) 7603866
Semarang 50146

Nomor SOP	W11-A/ /OT.01.3/VIII/2014
Tanggal Pembuatan	2010
Tanggal Revisi	7 Agustus 2014
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Sekretaris Mahkamah Agung RI

SOP PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Dasar Hukum:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah
Keterkaitan:
Internal dan Lintas Satker
Peringatan:
Keterlambatan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) dapat menghambat DIPA dan pelaksanaan TUPOKSI Satker

Kualifikasi Pelaksana:
Pejabat Struktural Staff Pelaksana
Peralatan Perlengkapan:
Laptop dengan Aplikasi RPTJM RENSTRA RKT TOR, RAB dan Dokumen Pendukung lainnya
Pencatatan dan pendataan:

No	Aktifitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		TIM PP Anggaran	Pansek	Ketua	MA RI	DJA	Kanwil DJPB	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Tim Perencanaan dan Penyusunan Anggaran dari satker wilayah melakukan persiapan dan rapat koordinasi dengan Tim Perencanaan dan Penyusunan Anggaran dari satker daerah dibawah koordinasi satker wilayah untuk merencanakan dan menyusun program dan anggaran yang menjadi dasar dalam penyusunan RKA-KL.	Mulai ↓ Proses						Rencana Statejik dan Program Kerja	1 Hari	Usulan Rencana Program dan Anggaran
2.	Tim Perencanaan dan Penyusunan Anggaran dari satker wilayah melaporkan hasil rapat koordinasi dengan Tim Perencanaan dan Penyusunan Anggaran satker daerah kepada Panitera / Sekretaris sekaligus rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan pemantapan penyusunan RKA-KL		Proses					Usulan Rencana Program dan Anggaran	1 hari	RKA-KL yang disepakati dengan Panitera/ Sekretaris
3.	Tim Perencanaan dan Penyusunan Anggaran wilayah bersama Panitera / Sekretaris melaporkan hasil rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan pemantapan penyusunan RKA-KL kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar			Proses				Matrik RKA-KL yang disepakati dengan Panitera/ Sekretaris	1 hari	RKA-KL yang disetujui oleh Ketua PTA. Makassar
4.	Pengiriman Hasil Usulan RKA-KL ke Biro Perencanaan dan Organisasi MARI				Proses			RKA-KL yang disetujui oleh Ketua	1 hari	Matrik RKA-KL dari MARI
5.	Tim Perencanaan dan Penyusunan Anggaran wilayah melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan data dukung berdasarkan Pagu Sementara bersama Biro Perencanaan dan Organisasi MARI	Proses						Pemberitahuan Pagu Sementara dari Biro Renog MARI	5 hari	RKA-KL berdasarkan Pagu Sementara serta data dukungnya



PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Jalan Hanoman No.18
Telp (024) 7600803 Fax (024) 7603866
Semarang 50146

Nomor SOP	W11-A/ /OT.01.3/VIII/2014
Tanggal Pembuatan	2010
Tanggal Revisi	7 Agustus 2014
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Sekretaris Mahkamah Agung RI

No	Aktifitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		TIM PP Anggaran	Pansek	Ketua	MA RI	DJA	Kanwil DJPB	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output
6.	Pembahasan dan Penelaahan RKA-KL berdasarkan pagu sementara dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI yang didampingi oleh Biro Perencanaan dan Organisasi MARI.	Proses			Proses	Proses		RKA-KL berdasarkan Pagu Sementara serta data dukungnya	1 Hari	Persetujuan DJA atas RKAKL Pagu Sementara
7.	Tim Perencanaan dan Penyusunan Anggaran wilayah melakukan penyusunan kembali RKA-KL dan data dukungnya untuk disesuaikan dengan pagu definitif yang diterima Mahkamah Agung RI berdasarkan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR.	Proses				Proses		Pemberitahuan Pagu Definitif dari Renog MARI	5 Hari	RKA-KL berdasarkan Pagu Definitif serta data dukungnya
8.	Pembahasan dan Penelaahan RKA-KL dan data dukung definitif dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk ditelaah secara bersama-sama					Proses		RKA-KL berdasarkan Pagu Definitif serta data dukungnya	1 hari	Persetujuan DJA atas RKAKL Pagu Definitif
9.	Berdasarkan RKA-KL hasil pembahasan dan penelaahan dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan berdasarkan pagu definitive disusun konsep Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) untuk penetapan pagu dalam DIPA	Proses						RKA-KL berdasarkan Pagu Definitif serta data dukungnya	1 Hari	Konsep DIPA
10.	Menginput Data RKA-KL final ke dalam Aplikasi DIPA untuk persiapan melakukan sinkronisasi dan validasi data DIPA yang ada.	Proses						Konsep DIPA	1 hari	Konsep DIPA yg telah siap di validasi
11.	Melakukan validasi Konsep DIPA dengan Kantor Wilayah Perbendaharaan Sulsel Kementerian Keuangan RI sekaligus Penandatanganan DIPA		Proses				Proses	Konsep DIPA yg telah siap di validasi	1 hari	Konsep DIPA hasil validasi dan ditanda tangani KPA
12.	Penyerahan DIPA secara simbolis		Selesai					DIPA	1 hari	DIPA